# BAB III

# AGAMA ISLAM DAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA MENURUT PRESIDEN SOEKARNO DAN SOEHARTO

## A. Agama Islam di Indonesia.

Indonesia sebagai negara lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, sesuai dengan proklamasi kemerdekaan yang berbunyi:

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan
Kemerdekaan Indonesia
Hal 2 jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja.

` Djakarta, 17 -8-'05
wakil 2 bangsa Indonesia.[1]

### 1. Unsur-unsur Negara Indonesia.

Unsur Negara terdiri dari wilayah, rakyat dan pemeritah. Sebuah Negara mempunyai wilayah tertentu dan batas wilayah kekuasaannya baik wilayah darat, laut dan udara. Kekuasaan negara tidak berlaku di luar wilayah kekuasaan negara, karena bisa menimbulkan sengketa dengan negara lain. Batas Negara ditentukan berdasar perjanjian dengan negara tetangganya. Rakyat diartikan sebagai manusia yang menduduki wilayah tertentu yang biasa disebut dengan

[1] Salinan dari teks asli bertulis tangan. "Tahun '05" adalah tahun Showa (Jepang) 2605 atau 1945 masehi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warga negara. Pemerintahan diartikan dengan alat negara yang menyelenggrakan segala kepentingan rakyatnya. Dalam arti luas, pemerintah adalah semua badan-badan negara dalam mengejar tujuan Negara. Agar lembaga negara itu tidak absolut, maka dibuatlah aturan yang biasa disebut dengan undang undang dasar.[2]

a. Wilayah Negara Indonesia

Wilayah Negara Indonesia berada di daerah bekas jajahan Belanda, sesuai dengan hasil sidang Dewan Konstuante tahun 1956- 1959. Diantara hasil sidang Dewan Konstuante yang bersidang antara tahun 1956 sampai dengan 1959 melahirkan keputusan pada pasal 1: Wilayah Negara Indonesia, sesuai dengan yang dimaksudkan pada waktu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda menurut keadaan pada saat pecahnya Perang Pacific tanggal 7 Desember 1941.[3] Indonesia terletak di Asia Tenggara dengan batas-batasnya:

Utara : Negara Malaysia, Brunai dan Filipina

Timur : Papua Newgini

Selatan : Negara Australia dan Lautan Hindia

Barat : Lautan Hindia

[2] Moh Kusnardi dan Bintan R Saragih, *Ilmu Negara*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 105-113

[3] Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta *22 Juni 1945*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1983), 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masa awal negara Indonesia baru merdeka, wilayah Indonesia hanya dibagi atas 8 (delapan) propinsi saja. Lembaga yang menetapkan pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.adalah PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tahun 1945. Keadaan di masa lalu tentu berbeda dengan kondisi di saat ini sehingga delapan propinsi sudah dirasa cukup, yaitu **:** 1). Propinsi Sumatera, 2). Propinsi Jawa Barat, 3). Propinsi Jawa Tengah, 4). Propinsi Jawa Timur, 5). Propinsi Sunda Kecil, 6). Propinsi Maluku, 7). Propinsi Kalimantan, dan 8). Propinsi Sulawesi. [4] Dewasa ini, wilayah Negara Indonesia berkembang menjadi 34 propinsi.

b. Rakyat atau Warganegara Indonesia.

Diperkirakan bahwa mayoritas penduduk yang menjadi warganegara Indonesia itu beragama Islam yang sedikitnya mencapai 88 persen..

Negara di Asia Tenggara ini disebut sebagai tanah dengan populasi Muslim tertinggi. Persentase Muslim Indonesia mencapai hingga 12,7 persen dari populasi dunia. Dari 205 juta penduduk Indonesia, dilaporkan sedikitnya 88,1 persen beragama Islam. [5]

c. Pemerintahan Negara Indonesia

Pemerintahan Negara Indonesia dipimpin oleh Presiden. Dari 7 presiden yang pernah memimpin Negara Indonesia itu beragama Islam. Adapun Presiden yang pernah memimpin Indonesia adalah: 1). Soekarno (1945-1967); 2). Soeharto

---

[4] http://www.organisasi.org/1970/01/daftar-8-provinsi-di-indonesia-pada-awal-kemerdekaan-tahun-1945.html, 23 Nopember 2015,

[5] http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/05/27/noywh5-inilah-10-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia, 12 Pebruari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1967-1998); 3). Bacharuddin Jusuf Habibie (1998-1999); 4). Abdurrahman Wahid (1999-2001); 5). Megawati Soekarnoputri (2001-2004; 6). Susilo Bambang Yudhoyono (2004 -2014); dan 7) Joko Widodo.

2. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Indonesia

Dalam menjalankan pemerintahan, maka dibutuhkan konsitusi Negara Indonesia yaitu UUD 1945. Adapun Sejarah UUD 1945 sebagai berikut :

a. UUD 1945. Undang Undang Dasar 1945 berlaku mulai tanggal 18 Agustus 1945.

Dalam Mukaddimahnya tertulis:

PEMBUKAAN

( P r e a m b u l e )

Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka pendjadjahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perdjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rachmat Allah Jang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannja.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

darah Indonesia dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan jang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakjatan yang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/ perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia.[6]

b. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) Berlaku mulai 14 Desember 1949. Dalam Mukadimahnya tertulis:

**MUKADDIMAH**

Kami bangsa Indonesia semendjak berpuluh-puluh tahun lamanja bersatu padu dalam memperdjuangan kemerdekaan, dengan senantiasa berhati teguh berniat menduduki hak-hidup sebagai bangsa yang merdeka berdaulat.

Kini dengan berkat dan rahmat Tuhan telah sampai kepada tingkatan sedjarah jang berbahagia dan luhur.

Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara yang berbentuk republik-federasi, berdasarkan pengakuan Ketuhanan Jang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan, dan keadilan sosial.

[6] AK Pringgodigdo, *Tiga Undang-Undang Dasar,* ( Djakarta: P.T. Pembangunan, 1954), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mewudjudkan kebahagiaan kesedjahteraan perdamaian dan kemerdekaan dalam masjarakat dan negara-hukum Indonesia merdeka jang berdaulat sempurna. [7]

c. UUDS 1950.

Undang Undang Dasar Sementara (UUDS) berlaku mulai 15 Agustus 1950–5 Juli 1959, dalam mukadimahnya tertulis:

Mukaddimah

Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perdjoangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dengan berkat dan rahmat Tuhan tertjapailah tingkatan sedjarah jang berbahagia dan luhur,

Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam Negara jang berbentuk republik-kesatuan, berdasarkan ke-Tuhanan Jang Maha Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial, untuk mewudjudkan kebahagiaan, kesedjahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masjarakat dan Negara-hukum Indonesia Merdeka jang berdaulat sempurna.[8]

[7] Ibid. 16.
[8] Ibid, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kembali ke UUD 1945

UUD 1945 kembali digunakan sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai kini. Adapun teks dekrit dapat dilihat dibawah ini.

DEKRIT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN PERANG TENTANG KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG

Dengan ini menjatakan dengan khidmat;
Bahwa andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, jang disampaikan kepada segenap rakjat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara;

Bahwa berhubung dengan pernjataan sebagian besar anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menjelesaikan tugas yang dipertjajakan oleh rakjat kepadanja.

Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahajakan persatuan dan keselamatan negara, nusa dan bangsa, serta merintangi Pembangunan Semesta untuk mentjapai masjarakat adil dan makmur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunja djalan untuk menjelamatkan negara proklamasi.

Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Juni 1945 mendjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.
Maka atas dasar-dasar tersebut di atas

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/ PANGLIMATERTINGGI ANGKATAN PERANG
Menetapkan pembubaran Konstituante;

Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini, dan tidak berlakunja lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, jang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat dengan utusan-utusan daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara, akan diselenggaerakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 5 Juli 1959
Atas nama rakjat Indonesia

Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang

Soekarno.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dasar Negara dalam UUD 1945.

Bangsa Indonesia setelah merdeka mengalami perkembangan dalam mengatur UUD yang terdiri dari Piagam Jakarta, UUD 1945, UUD RIS, UUDS tahun 1950, Kembali ke UUD 1945.

Menurut Piagam Jakarta, Dasar Negara RI adalah Pancasila dengan rumusan:

1. KeTuhanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja.
2. Kemanusiaan jang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat- kebidjaksanaan dalam permusjarawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia.

Menurut UUD 1945, Dasar Negara RI adalah Pancasila dengan rumusan:

1. Ketuhanan Jang Maha Esa.
2. Kemanusiaan jang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakjatan yang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/ perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia. [9]

Menurut UUD RIS, Dasar Negara RIS adalah Pancasila dengan rumusan:

1. Ketuhanan Jang Maha Esa,
2. Perikemanusiaan.
3. Kebangsaan.
4. Kerakjatan.

[9] Ibid, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Keadilan sosial.

Menurut UUDS tahun 1950, dasar Negara Indonesia dengan rumusan:

1. Ke-Tuhanan Jang Maha Esa.
2. Peri-kemanusiaan.
3. Kebangsaan.
4. Kerakjatan.
5. Keadilan sosial.

Kembali ke UUD 1945 dengan dasar:

1. Ketuhanan Jang Maha Esa.
2. Kemanusiaan jang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakjatan yang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/ perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia. [10]

3. Hubungan Agama Islam dan Dasar Negara Indonesia

Agama Islam mempunyai hubungan yang tak terpisahkan dengan UUD 1945 sebagaimana dalam sejarah pembentukan Undang- Dasar Negara Indonesia.

a. Piagam Jakarta dalam sejarah konstitusi Negara Indonesia.

Piagam Jakarta lahir 22 Juni 1945. Dalam pembukaan alinea ke-4 berbunyi:

> Kemudian dari pada itu membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban

[10] Ibid, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat, dengan berdasar kepada: keTuhanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja; menurut dengan kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat-kebidjaksanaan dalam permusjarawaratan perwakilan serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia.

Sedang dalam UUD 1945 alinea ke-4 berbunyi :

> Kemudian dari pada itu membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia jang berkedaulatan Rakjat, dengan berdasar kepada: keTuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat-kebidjaksanaan dalam permusjarawaratan perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia.

Perubahan yang terjadi pada Tanggal 18 Agustus 1945, tujuh kata penting dalam Piagam Jakarta “dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja,” disepakati oleh Panitya Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dirubah menjadi” Yang Maha Esa, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, agar wilayah Indonesia bagian Timur tetap bersedia bergabung dengan Negara Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Posisi Agama Islam dalam Negara Indonesia.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menyatakan bahwa Piagam Jakarta itu menjiwai UUD 1945. Artinya, Agama Islam sebagai pendorong dalam melahirkan dan menjalankan UUD 1945. Perbedaan mendasar antara Piagam Jakarta dan UUD 1945 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

| No | Bagian perbedaan | Piagam Jakarta | UUD 1945 |
|---|---|---|---|
| 1 | Judul | kata : Mukaddimah | Kata :Pembukaan |
| | Pembukaan alenea 4 | maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia jang berkedaulatan Rakjat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja; menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab | maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat dengan berdasar kepada: Ketuhanan jang Maha Esa, kemanusiaan jang adil dan beradab, |
| 3 | Pasal 6 ajat 1 | Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam | Presiden ialah orang Indonesia asli. |
| 4 | Pasal 29. ajat 1 | Negara berdasarkan atas Ketuhananan, dengan kewadjiban menjalankan sjariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." | Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa |

Walaupun demikian, agama Islam tetap berada dalam UUD 1945 alenea III yang tertulis:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Atas berkat rachmat Allah Jang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannja.

Bahkan dengan tegas dinyatakan dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959, bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945, Dalam dekrit itu dinyatakan:

> Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Juni 1945 mendjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.

Dengan bantuan ilmu sejarah dapat diketahui bahwa Negara Indonesia terletak di Asia Tenggara yang berada di luar Negara-negara Arab; mayoritas penduduknya beragama Islam, Dalam konstitusinya, Agama Islam menjiwai Pembukaan UUD 1945; semua dari tujuh presiden sampai dengan tahun 2016 ini, kepala negara RI itu beragama Islam, khususnya Presiden Soekarno dan Soeharto sebagai presiden pertama dan kedua R.I.

B. Pengetahuan Kebudayaan Presiden Soekarno tentang Agama Islam dan Pembangunan Nasional.

Soekarno adalah Presiden Negara Indonesia mulai tahun 18 Agustus 1945 sampai dengan tahun 1967. Pengetahuan sebagai system budaya Soekarno tentang nilai dan norma dapat ditelusuri sebagai berikut:

1. Riwayat Singkat Presiden Soekarno

Presiden Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Ia mengenal agama Islam dari Cokroaminto, tokoh Syarekat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam ketika sekolah di tingkat SMA di Surabaya; ia mulai menekuni pergerakaan Nasional Indonesia dengan mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) seusai menamatkan kuliah Teknik di Bandung. Kemudian ia menjadi presiden mulai tahun 1945 sampai dengan 12 Maret 1967. Dia meninggal dunia pada 21 Juni 1970 di Jakarta dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur.

2. Belajar Agama Islam

Soekarno berasal dari keluarga theosofi Jawa dan mengenal agama Islam dari H.O.S. Tjokroaminto di Surabaya. Ia belajar agama Islam kepada A. Hassan melalui surat-surat ketika berada dalam penjara di Endeh.

Ketika melanjutkan Sekolah lanjutan di Surabaya, Soekarno bertempat di Rumah HOS Tjokroaminoto, pemimpin Syarikat Islam. Dalam hal ini, Soekarno menyatakan:

> Pak Tjokro adalah pudjaanku, Aku muridnja. Setjara sadar atau tidak sadar ia menggemblengku. Aku duduk dekat kakinja dan diberikannya kepadaku buku-bukunja, diberikannja padaku miliknja jang berharga.[11]

Dalam surat Soekarno tertanggal 17 Oktober 1936 kepada A.Hassan, sebagiannya tertulis:

> Dan sekarangpun, jang saja- alhamdulillah-, berkat pertolongan Allah dan pertolongan tuan dan pertolongan orang-rang lain, sudah lebih bulat dan lebih jakin ke-Islam-an saja itu. Sekarangpun hati saja malahan lebih

[11] Cindy Adam, *Bung Karno Penjambung Lidah Rakjat Indonesia*, ( Djakarta: Gunung Agung, MCMLXVI/1966), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luka dan gegetun kalau saja melihat keadaan keadaan dikalangan ummat Islam jang seakan-akan menentang Allah dan menentang Rasul itu.[12]

3. Naik Haji

Sebagai muslim, Presiden Soekarno beribadah naik haji ke Makkah tahun 1955. Sebuah kenangan yang kini masih membekas adalah Pohon Soekarno.

Lalu kenapa pohon mimba disebut Pohon Soekarno di Arab Saudi? Disebut pohon Soekarno karena orang pertama yang mengenalkan pohon tersebut adalah Presiden Soekarno. Pada tahun 1955, Presiden Soekarno menunaikan ibadah haji. [13]

4. Pembangunan Masa Presiden Soekarno

Jaman Kemerdekaan Indonesia, pembangunan masa Presiden Soekarno terbagi menjadi tiga era, yaitu:

a. *Pertama* : Era Awal Kemerdekaan ( 1945-1950).

Dalam rangka melakukan pembangunan diawal kemerdekaan, Badan Perancang Ekonomi menyusun " Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun"

[12] Sukarno, *Dibawah Bendera Revolusi, Jilid Pertama Tjetakan Kedua*, (Djakarta: Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1963), 342.
[13] http://www.sikerok.com/kisah-pohon-bernama-soekarno-di-arab-saudi, 24 Nopember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Program ini menekankan nasionalisasi perusahaan Belanda dan Jepang, perusahaan vital dengan ganti rugi. Program ini gagal karena adanya Agresi Belanda II dan pemberontakan Muso di Madiun. [14]

b. *Kedua*: Era Demokrasi Liberal ( 1950-1959)

Dalam era demokrasi liberal dibawah Presiden Soekarno, muncullah konsep pembangunan "Rencana Urgensi Perekonomian"(RUP) dan Rencana Pembangunan Lima tahun.(RPLT).

Salah satu fakta yang dapat diterangkan mengenai pembangunan ekonomi Indonesia pada masa awal Demokrasi Liberal adalah program-program yang bernama : Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) Kabinet Natsir (6 September 1950-20 Maret 1951 dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (1956-1961) dirancang dalam Kabinet Ali Sastramidjojo II dari PNI.

> Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) dibuat pada waktu Kabinet Natsir di bidang ekonomi yang intinya merupakan kelanjutan dari politik ekonomi benteng.[15] Program baru ini merupakan ide dari Menteri Perdagangan dan Industri Dr. Soemitro Djojohadikusumo. Dikeluarkannya RUP memberi arah pembangunan khususnya pembangunan ekonomi yang didasarkan pada politik ekonomi benteng. RUP berisi program-program yang sifatnya nasionalistis. Program tersebut antara lain usaha memperbesar produksi nasional dan pemberian fasilitas bank khususnya diberikan kepada pengusaha nasional pribumi.

---

[14] A. Hauken S.J., dkk, *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila,Jilid IV, Par-Z,* (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1991). 50.

[15] Politik Ekonomi Benteng adalah politik ekonomi Negara Indonesia dalam memdorong kebangkitan ekonomi yang berfihak pada kaum pribumi dalam menghadapi kaum kapitalis asing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasionalisasi Ekonomi. Politik ekonomi benteng dan RUP merupakan usaha nasionalisasi untuk secepatnya mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Dalam nasionalisasi ekonomi, pemerintah berusaha mengambil alih perusahaan-perusahaan swasta yang pada masa itu banyak dikuasai orang-orang Cina dan Belanda. Usaha nasionalisasi terus dilakukan tetapi pada kenyataannya Indonesia belum bisa lepas dari bantuan asing. Oleh karena itu kerjasama dengan bangsa lain masih terus di lakukan terutama untuk sektor yang belum mampu ditangani Bangsa Indonesia.[16]

Selanjutnya, Rencana Pembangunan Lima Tahun (1956-1961) dirancang dalam Kabinet Ali Sastramidjojo II dari PNI yang didukung Masjumi dan NU dari hasil pemilu 1955 tanpa didukung PKI, dengan tujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. [17]

c. *Ketiga* : Era Demokrasi Terpimpin ( 1959-1967)

Dalam Era Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno menyusun Program Pembangunan Semesta Berencana untuk tahun 1961-1969, namun program ini belum berjalan 8 tahun, Presiden Soekarno turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia digantikan oleh Soeharto.

Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menyusun Program Pembangunan Semesta Berencana 1961-1969. Progam pembangunan yang didukung oleh kelompok revolusioner yang terdiri dari partai partai besar dari golongan Nasionalis (PNI), Agama ( NU) dan Komunis (PKI). Pembangunan itu

[16]https://donipengalaman9.wordpress.com/2015/10/06/perekonomian-pada-masa-demokrasi-liberal/, 23 Nopember 2015.
[17] Ruben Nalenan, " Ali Sastroamidjojo Merombak Kekuatan Dunia", dalam *Prisma* No,4 April 1984 tahun XII, LP3ES Jakarta, 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasar Pancasila dan Manipol USDEK. Adapun pengertian dan tujuan Program Pembangunan Semesta Berencana sebagai berikut:

> Apa arti Pembangunan? Pembangunan dalam arti rekonstruksi dIbidang materiil dan spirituil.[18]
>
> NASIONAL : Karena pola tersebut harus menggambarkan keinginan seluruh daerah dan seluruh lapisan dan golongan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Penebaran projek pembangunan mendjamin sifat nasional Indonesia, sehingga ekonomi tidak perlu dibentuk diatas tuntutan-tuntutan jang tidak bermanfaat.
>
> SEMESTA : Karena pola tersebut harus meliputi seluruh lapangan hidup bangsa dan negara. BERENTJANA: Karena tidak mungkin tertjapai pelaksanaan masjarakat adil dan makmur sekali gus, akan tetapi dilaksanakan setapak demi setapak, tahap demi tahap, tingkat demi tingkat, daerah demi daerah, lapangan demi lapangan, dengan lain perkataan: tidak sekali gus tetapi secara berentjana, namun dengan tjepat dan deras sesuai dengan irama gelombang revolusi Indonesia. [19]

Tujuan dari Pembangunan Nasional Semesta Berentjana adalah SOSIALISME INDONESIA, jaitu tata masjarakat adil - dan- makmur berdasarkan Pantjasila.[20]

Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang berdasar Pancasila dan Manipol USDEK ditolak oleh Masjumi, namun diterima oleh tiga partai besar

---

[18] Ruslan Abdulgani, *Pendjelasan Manipol dan Usdek*, (Medan: Penerbit Madju, 1961), 13.
[19] Djawatan Penerangan R.I. Propinsi Jawa Timur, *Doktrin Revolusi Indonesia*, (Surabaja: P.T. Persahabatan Press, 1965), 511.
[20] Ibid, 512.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya, yaitu PNI, Partai NU dan PKI (NASAKOM). Kemudian Presiden Soekarno memaksa kepada Masjumi untuk dibubarkan.

Soekarno turun sebagai presiden dimulai dari peristiwa penculikan petinggi ABRI tanggal 30 Septermber 1965 yang dilaksanakan oleh Letnal Kolonel Untung. Dalam rangka menjamin keamanan dan jalanya Revolusi dan keamanan presiden, Soekarno sebagai presiden menandatangai Surat Perintah Sebelas Maret 1966 yang ditujukan kepada Letnan Jendral Soeharto. Sehari sesudahnya, Letnal Jendral Soeharto (Pengemban Supersemar) atas nama presiden membubarkan PKI dan ormas-ormasnya karena terlibat Gerakan 30 September. Pembubaran itu diperkuat ketetapan MPRS. No XXV/MPRS/1966 tanggal 6 Juli. Berdasarkan Ketetapan MPRS tahun 1967 Presiden Soekarno diberhentikan dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden.

5. Pidato- Pidato Presiden Soekarno Mengenai Agama Islam dan Pembangunan

Dalam pidatonya, Presiden Soekarno menggunakan konsep-konsep agama Islam dan Pembangunan Nasional, baik dalam pidato keagamaan maupun pidato kenegaraan. Konsep agama Islam yang muncul seperti Assalamualaikum, Nabi Muhammad SAW, insya Allah, menyebut ayat al-quran tentang taqwa, dan syukur al-hamdulillah. Sebaliknya, Presiden Soekarno menyatakan bahwa Negara Memerintahkan kepada semua partai politik untuk mengikuti Manipol-USDEK dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana dan memberikan hukuman (sanksi) terhadap kelompok Islam yang menentang Pembangunan Nasional berdasar Pancasila dan UUD 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pidato Keagamaan Presiden Soekarno

Disamping pidato politik kenegaraan, Soekarno juga berpidato dalam memperingati hari-hari keagamaan Islam. Sebagai muslim dan kepala negara, ia memperingati Maulid Nabi Muhammad tahun 1963 di Istana Negara, dengan cuplikannya sebagai berikut:

> *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*
> Saudara-saudara,
>
> Tadi, Bapak Menko Prof. Kyai Saifuddin Zuhri mengatakan bahwa waktu di Paris, saya sedang sibuk-sibuknya memberi amanat dan pimpinan kepada duta besar kita.Pada waktu itu, saya tidak lupa memperingatkan kepada Bapak Saifuddin Zuhri untuk mengadakan perhelatan Maulud Nabi di Istana Negara.
>
> Memang demikian saudara-saudara. Bahkan lebih dulu dari pada itu, di Kairo, kemudian dari Kairo ke Paris. Bahkan di Kairo, tatkala saya nyantol di situ, karena tidak bisa langsung pergi ke Aljazair, tetapi kemudian mengadakan pertemuan yang amat penting dengan Presiden Nasser, Presiden Ayyub Khan, Perdana Menteri Chou En Lai. Di Kairo itu saya tidak berhenti-berhenti ingat.Wah, ini bulan Maulud, ini Bulan Maulid.Kita nanti di Jakarta harus mengadakan Peringatan Maulid yang sebaik-baiknya.
>
> Maka di Kairo itu saya ingat bahwa Hari Maulid atau Perayaan Hari Maulud sebenarnya bukan suatu hal yang wajib. Kita ini hanya mempunyai dua hari besar Islam yaitu hari idul fitri dan idul kurban. Cuma dua itu, hari besar kita.Tetapi sebagai saudara-saudara mengetahui, jaman sekarang, salah satu hari yang kita mulyakan, di dalam perikehidupan kita sebagai umat Islam ialah hari maulid nabi kita yang kita cintai. [21]

[21] http://bironaskahpidato.blogspot.co.id/2013/11/isi-pidato-presiden-sukarno-pada.html, 22 *oktober 2015.Teks Ejaan Soewandi sudah diganti dan ditulis dengan E.Y.D.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pidato Proklamasi

Ketika membacakan teks proklamasi, Soekarno mengucapkan pidato yang didalamnya terdapat unsur agama Islam yaitu kalimat : "Insja Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu " dalam baris terakhir sebagai berikut:

> Saudara-saudara! Dengan ini kami njatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami :
>
> **Proklamasi**
>
> **Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan**
> **Kemerdekaan Indonesia**
> **Hal 2 jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnya.**
>
> **Djakarta, 17 -8-'05**
> **wakil 2 bangsa Indonesia.**[22]
>
> Demikanlah,saudara-saudara!
> Kita Sekarang telah merdeka!
> Tidak ada satu ikatan lagi jang mengikat tanah-air kita!
> Mulai saat ini kita menjusun Negara kita !Negara Merdeka, Negara Republik Indonesia, -merdeka kekal dan abadi.
> Insja Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu! [23]

[22] Salinan dari teks asli bertulis tangan.
[23] Muallif Nasution, *Dibawah Bendera Revolusi, Oleh Ir. Soekarno Djilid Kedua Tjetakan Kedua*, (Djakarta: Panitya Penerbit dibawah Bendera Revolusi, 1965), 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pidato Presiden Soekarno Tentang Penemuan Kembali Revolusi Kita

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno berpidato tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" atau lebih dikenal dengan Manifesto Politik /Manipol USDEK.[24]

Soekarno menggambarkan bahwa revolusi kemerdekaan telah berjalan lama, namun belum mumbuahkan hasil.

1. Tahun Revolusi fisik (1945-1950) Merebut dan mempertahankan kekuasaan dari imperialis.
2. Tahun Survival, tahun tetap hidup, sekedar hidup (1950-1956), Tahun penyembuhan luka-luka, periode kompromis dan reformasi.
3. Tahun memasuki alam pembangunan (1956), Revolusi sosial ekonomi dengan pengalihan dari sistem ekonomi asing ke sistem ekonomi nasional. Perusahaan Belanda dinasionalkan.
4. Tahun Penemuan Kembali Revolusi kita (1959), Sebuah kesadaran akan dasar dan tujuan revolusi, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945. [25]

Selanjutnya Soekarno menyatakan bahwa apa yang berada di hadapan kita?. Soekarno menjawab: Tiga segi kerangka.

Apa tiga segi kerangka itu?

[24] USDEK singkatan dari UUD 1945, Sosialisme, Demokrasi Terpimpin. Ekonomi Terpimpin. dan Kepribadian Indonesia.
[25] Soekarno, *Penemuan Kembali Revolusi Kita, Pidatio Presiden Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1959*, ( Jakarta: Kementrian Penerangan RI, Penerbitan chusus 60), 1-9 dan 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *Kesatu*: Pembentukan satu Negara Republik Indonesia yang berbentuk Negara Kesatuan dan Negara-Kebangsaan, yang demokratis, dengan wilajah kekuasaan dari Sabang sampai ke Merauke.
>
> *Kedua*: Pembentukan suatu masjarakat jang adil dan makmur, material spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu.
>
> *Ketiga*: Pembentukan satu persahabatan jang baik antara Republik Indonesia dan semua Negara di dunia. …. Menudju kepada perdamaian dunia jang sempurna.[26]

Soekarno dalam tahun 1959 merencanakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didalamnya terdapat masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasar Pancasila dan UUD 1945.

d. Pidato Presiden Soekarno di depan Sidang PBB tahun 1960

Pidato Presiden Soekarno tentang Agama Islam dan Pembangunan yang dikumandangkan di depan Sidang Umum PBB tanggal 30 September tahun 1960, ia mengemukakan ayat al-Qur'an sebagai kitab suci. Adapun cuplikannya sebagai berikut:

> Kitab Sutji Islam mengamanatkan sesuatu kepada kita pada saat ini. Qur'an berkata: "Hai, sekalian manusia, sesungguhnja Aku telah mendjadikan kamu sekalian dari seorang lelaki dan seorang perempuan, sehingga kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu sekalian kenal-mengenal satu sama lain. Bahwasanja jang lebih mulia diantara kamu sekalian, ialah yang lebih taqwa kepadaKu".[27]

---

[26] Ibid, 47-48.
[27] Departemen Penerangan R.I. *Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi*, ( Djakarta: Percetakan Negara, 1961), 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pidato Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1960 dengan judul: Djalannja Revolusi kita (Djarek).

Dalam pidato Presiden Soekarno tahun tanggal 17 Agustus 1960 yang berjudul Djalannya Revolusi Kita (Djarek) menyatakan bahwa Masjumi dan PSI harus bubar karena menolak Pembangunan Nasional Berencana berdasar Pancasila dan Manipol-USDEK. Menurut Soekarno, pembubaran Masjumi itu bukanlah anti terhadap Islam, akan tetapi keduanya ( Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia/PSI) itu membahayakan Negara RI. Presiden Soekarno menyatakan:

> Berdasarkan hal-hal ini, saja beritahukan kepada Rakjat bahwa saja sebagai Presiden Republik Indonesia, sesudah mendengar pendapat Mahkamah Agung, beberapa hari jang lalu telah memerintahkan bubarnja Masjumi dan P.S.I. Djikalau satu bulan sesudah perintah ini diberikan. Masjumi dan P.S.I. belum dibubarkan, maka Masjumi dan P.S.I. adalah partai-partai jang terlarang! Djanganlah mengira bahwa dengan ini Pemerintah memusuhi Islam. Memang ada orang-orang jang dengan tjara jang amat litjin sekali menghasut-hasut, bahwa "Islam dalam bahaja". hasutan jang demikian itu adalah hasutan jang djahat. Sebab Pemerintah tidak membahajakan Islam, sebaliknya malah mengagungkan semua agama. Pemerintah bertindak terhadap partai jang membahajakan Negara! [28]

f. Pidato Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1961 berjudul Re-So-Pim

Re-So-Pim adalah singkatan dari Revolusi, Sosialisme dan Pimpinan Nasional. Ia menyatakan bahwa demokrasi terpimpin itu demokrasi yang

[28] Djawatan Penerangan R.I.Propinsi Jawa Timur, *Doktrin Revolusi*, 171-172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatukan antara diktator fasisme dan demokrasi liberal. Dalam sebagian pidatonya, ia menyatakan:

> Djikalau demikian Demokrasi terpimpin, maka demokrasi Terpimpin kita itu tegas-tegas njata mempunjai dua unsur: Unsur "demokrasi", dan unsur "terpimpin". Kita tidak boleh hanja melihat satu sumber sadja, jaitu demokrasi tok atau terpimpin tok. Kedua-dua unsur itu adalah dua unsur jang ta' terpisah-pisahkan, dua unsur jang bergandengan mutlak satu sama lain, dua unsur loro-loroning-atunggal. *Demokrasi tok bisa njeleweng ke liberalisme, terpimpin tok bisa menjeleweng ke-dikataur fasis*.[29]

g. Pidato Presiden Soekano tanggal 17 Agustus 1964

Tahun Vivere Pericoloso yaitu tahun menyerempet bahaya ketika ber-konrontasi dengan Inggris dan Malaysia. Ia tetap dalam Manipol USDEK sebagai amanat penderitaan rakyat, dan sebagai muslim, ia menyatakan "Alhamdulillah". Dalam pidatonya, Soekarno menyatakan:

> Saja pada waktu itu tjemas sekali. Tjemas sekali ! Tetapi Alhamdulillah, sebelum kasip, kita **"banting setir",** kearah djalan Revolusi jang asli. Stop kegila-gilaan ! Stop penjelewengan ! Kembali ke Undang-undang Dasar '45 ! Kembali ke romantika, dinamika, dialektika Revolusi ! Kembali kepada Amanat Penderitaan Rakjat ! Kembali ! Kembali ! Ini Manipol !, obor perdjalananmu ! Ini USDEK !, tunggak ingatanmu !.[30]

---

[29] Sukarno, *Dibawah Bendera Revolusi, Jilid Kedua Tjetakan Pertma*, (Djakarta: Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1965). 465.

[30] Soekarno, , *Tahun ber-vivere Pericoloso, Pidato Amanat Presiden/Panglima Tertinggi Pemimpin Besar Revolusi,pada tanggal 17 Agustus 1964*, ( Surabaya: Penerbit Grip, 1964), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Pidato Pelengkapan Nawaksara di Hadapan MPRS 1967.

Setelah pidato Nawaksara yang berisi 9 point itu ditolak oleh MPRS, Soekarno melengkapi pidatonya tahun 1967. Dalam pidatonya di hadapan MPRS yang menggambarkan dirinya sebagai muslim dengan ucapan "Syukur Alhamdulillah" dan mengutuk Gestok (G.30.S). Ia menyatakan.

> Saja dalam pidato 17 Agustus 1966, dan dalam pidato 5 Oktober 1966 mengutuk Gestok. 17 Agustus 1966 saja berkata: " Sudah terang Gestok kita kutuk![31] Dan saja, saja mengutuknja pula !"…
>
> Sjukur Alhamdulillah, saja dalam semua peristiwa itu dilindungi oleh Tuhan! Kalau tidak, Tentu saja sudah mati terbunuh! Dan mungkin akan Saudara namakan "tragedi nasional" pula. Tetapi sekali lagi saja menanja: Kalau saja disuruh bertanggung djawab atas terdjadinja G.30.S, maka saja menanja: siapa jang harus diminta pertanggungan djawab atas usaha pembunuhan kepada Presiden/Pangti, dalam tudjuh peristiwa jang saja sebutkan di atas itu? Kala bitjara tentang "Kebenaran dan Keadilan" maka saja pun minta, "Kebenaran dan Keadilan"! [32]

Pidato-pidato Presiden Soekano adalah pidato yang serius dalam kehidupan bernegara rangka dalam mengatur kehidupan bernegara Indonesia.

6. Pengetahuan Kebudayaan Presiden Soekarno

Pengetahun kebudayaan sebagai pedoman hidup Presiden Soekarno yang terdiri dari nilai dan norma serta sanksinya sebagai berikut:

---

[31] Gestok adalah singkatan dari Gerakan Satu Oktober, Penamaan Soekarno terhadap G.30.S. 1965.

[32] Supolo Prawotohadikusumo, *Dari Orde Lama ke Orde Baru*, (Djakarta: Pantjuran Tudjuh, 1967), 4 dan 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Nilai.

Nilai sebagai pedoman hidup Presiden Soekarno berpegang pada: 1). Agama Islam, 2).Pembangunan Nasional Semesta Berencana menuju masyarakat adil dan makmur atau sosialisme berdasar Pancasila dan Manipol-USDEK.

b. Norma.

Norma sebagai pedoman hidup yang menjadi milik Presiden Soekarno adalah: Negara Memerintahkan kepada semua partai politik untuk mengikuti Manipol-USDEK dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

c. Sanksi :

Menurut Soekarno, Negara membubarkan Masjumi dan P.S.I. karena membahayakan negara yang berdasar Pancasila dan Manipol-USDEK.

C. Pengetahuan Kebudayaan Presiden Soeharto tentang Agama Islam dan Pembangunan Nasional.

1. Riwayat Singkat Presiden Soeharto

Presiden Soeharto yang biasa dipanggil Pak Harto lahir di Godean Yogyakarta pada tahun1921. Ia belajar agama Islam ketika masih remaja di Solo. ia mulai meniti karir militer mulai jaman Belanda, Jepang dan Negara Indonesia yang akhirnya menjadi presiden mulai tahun 1967 sampai dengan 1998 . Ia meninggal di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Giri Bangun, Solo Jawa Tengah. Upacara pemakaman Soeharto tersebut dipimpin oleh inspektur upacara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. [33]

b. Belajar Agama Islam.

Dimasa kecil, Soeharto Hidup dalam lingkungan keluarga Jawa yang menganut faham Sangkan Paraning Dumadi. Selanjutnya, ia belajar di Sekolah Rendah 5 tahun di Yogyakarta, kemudian melanjutkan Sekolah Lanjutan Rendah di Wonogiri dengan menumpang pada keluarga Pak Harjo, pengawas Irigasi. Soeharto mengikuti Pak Harjo mengikuti pengajian di Langgar Kiai Darjatmo.

> Soeharto jadi bisa meresapkan ajaran filsafat hidup Kiai Darjatmo. Dia juga mendengarkan penjelasanya mengenai isi kitab suci al Qur'an, mendapatkan pengertian mengenai apa itu samadi dan apa itu kebatian.[34]

Seusai sekolah dasar di Wonogiri, Soeharto melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah di Yogyakarta yang cara berpaikannya boleh menggunakan sarung tanpa sepatu.[35]

c. Naik Haji

Sebagai muslim, Presiden Soeharto beserta keluarganya menunaikan ibadah haji tahun 1991 dalam usia 71 tahun.

> Minggu 16 Juni 1991, Presiden Soeharto bertolak dari Bandara Halim Perdana Kusuma berangkat ke tanah suci Makkah dalam rangka menunaikan

---

[33] http://danypedrose.blogspot.co.id/2012/10/kisah-misteri-dibalik-meninggalnya-tiga.html, 24 Nopember 2015.

[34] Ira Trianggo, *Rindu Soeharto, Dipuja, Dicerca, dan kini Dirindu*, (Yogyakarta: Penerbit Bangkit, 2012), 33.

[35] Ibid,34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibadah haji. Anggota keluarga yang ikut ibadah haji adalah Ibu Tien Soeharto, Siti Hadiyanti Rukmana, Indra Rukmana, Siti Hadiyanti Prabowo, Prabowo Subianto, Bambang Trihatmojo, Halimah Bambang dan Hutomo Mandala Putra. Dalam kegiatannya di Tanah Arab, Presiden Soehato mendapat jamuan dari Raja Saudi Arabia bernama Fahd, dan memberinya nama kepada keduanya dengan nama Muhammad dan Fatimah. [36]

2. Pembangunan Masa Presiden Soeharto,

a. Naiknya Presiden Soeharto

Bermula dari Surat Perintah Sebelas Maret 1966, Soeharto memegang jabatan sebagai Presiden. Berdasarkan wewenang yang bersumber pada Surat Perintah sebelas Maret, Letnan Jendral Soeharto atas nama presiden menetapkan pembubaran dan Pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI) termasuk semua bagian bagian organesasi dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organesasi yang seasas/berlindung/ bernaung di bawahnya dibawahnya.[37]

Selanjutnya, MPRS mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan mengangkat Jendral Soeharto sebagai pejabat (Pj) Presiden RI sejak 12 Maret 1967. Setahun kemudian, Ia diangkat menjadi Presiden RI pada tanggal 17 Maret 1968.

b. Pembangunan Nasional

Pembangunan adalah usaha terencana dalam memajukan masyarakat. Sedang pembangunan nasional adalah pelaksanaan proklamasi kemerdekaan.

---

[36] Team Dokumentasi Presiden RI, *Jejak Langkah Pak Harto, 21 Maret- 11 Maret 1993*, (Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1993), 435-436.

[37] Skretariat Negara Republik Indonesia, *30 Tahun Indonesia Merdeka, 1965-1973*, (Jakarta: PT. Citra Lamtoro Gung Persada, 1986), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemerdekaan politis dilanjutkan dalam pemerdekaan seluruh bangsa dan semua warganegaranya dari segala yang menghambat kemanusiannya, seperti kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, paksaan, ketakutan, ketidak adilan dan sejenisnya.[38]

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila didalam wadah kesatauan RI yang merdeka, berdaulat, bersatu, berkedaultan rakyat dalam suatu perikehidupan yang aman, tentram. tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.[39]

Pembangunan Nasional diatas dapat dipilah menjadi tiga bagian; *Pertama* stabilitas keamanan nasional dalam wilayah R.I.*Kedua*, tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasar Pancasila ; *Ketiga*, ikut serta menjaga perdamaian dunia..

c. Pembangunan Jangka Panjang

Pembangunan Jangka Panjang adalah rencana pembangunan antara 25-30 tahun. Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang: Pengadaan landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.[40]

---

[38] A. Hauken S.J.,dkk, , *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila,Jilid IV, Par-Z,* (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1991), 51.
[39] Ibid, 52
[40] Ibid , 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembangunan dibagi menjadi dua bagian: *Pertama*: Pembangunan jangka Panjang I, dan kedua; Pembangunan Jangka Panjang II. Repelita atau Rencana Pembangunan Lima tahun masa pemerintahan Presiden Soeharto. Repelita merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah lima tahunan dengan titik berat pada:

1) Repelita I: 1969 -1974: Pertanian dengan industri yang mendukungnya.
2) Repelita II: 1974 -1979 : Pertanian dan industri pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku.
3) Repelita III: 1979 -1984: Pertanian yang menuju swasembada pangan dan industri pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi.
4) Repelita IV: 1984-1989: Pengadaan landas pertanian swasembada pangan dan industri mesin (ringan maupun berat)
5) Repelita V: 1989 -1994: Pengadaan landas pertanian swasembada pangan dan industri mesin (ringan maupun berat)
6) Repelita VI: 1994-1999. Pembangunan Tinggal Landas menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.[41]

d. Turunnya Presiden Soeharto.

Soeharto menyatakan berhenti dari Presiden tanggal 21 Mei 1998 dan menyerahkan kepimimpinannya kepada Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Soeharto.

[41] Ibid , 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pidato-Pidato Presiden Soeharto mengenai Agama Islam dan Pembangunan.

Keislaman Presiden Soehato itu nampak dalam pidato-pidatonya seperti ucapan Al Hamdulillah, Nabi Muhammad SAW dan Inya Allah, sebaliknya, Presiden Soeharto memerintahkan kepada organesasi partai politik Islam untuk mengikuti Pembangunan Nasional berdasar Pancasila yang murni dan konsekwen, dan memberikan hukuman kepada penolaknya.

a. Pidato Presiden Soeharto tahun 1967.

Sebagai Pejabat Presiden, Soeharto berpidato di depan DPR GR tahun 1967, ia menyatakan bahwa Pembangunan kembali ke Pancasila dan UUD 1945 yang murni dan konsekwen. Ia menyakatan dalam pidatonya yang cupikannya sebagai berikut:

Setelah Sidang Umum ke-IV MPRS dan Pembentukan Kabinet Ampera, tugas Hankamnas dihadapkan pada dua karya pokok, jakni:

1. Karya ikut serta mensukseskan Strategi Dasar Kabinet Ampera.
2. Karya mengamankan keseluruhan strategi Dasar Kabinet Ampera diselelenggarakan dengan dua usaha pokok, jakni: a. Menegakkan dan membina Orde Baru, sehingga dapat disusun daerah pangkal Panca-Sila dan Undang-undang Dasar 1945, agar selanjutnja Panca-Sila dan Undang-undang Dasar 1945 dapat diselamatkan dan diamalkan secara murni dan konsekwen. [42]

[42] Soeharto, *Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Djendral Soeharto di depan Sidang DPRGR, 16 Agustus 1967*, dalam : Departemen Penerangan R.I., 10 Tahun Perjoeangan Orde Baru, ( Surabaya: P.T. Grip, tt), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pidato Presiden Soeharto dalam Peringatan Nuzulul Qur'an 1971

Sambutan Presiden Soeharto pada Peringatan Nuzulul Qur'an tanggal 6 Nopember 1971 di Istana Negara, Presiden Soeharto menyatakan bahwa Agama Islam dan Pembangunan Nasional adalah sejalan, Pembangunan yang hanya mengejar aspek lahiriyah akan menjadi malapetaka. Pembangunan aspek lahir dan bathin manusia akan mendatangkan kebahagiaan. ia menyatakan yang cuplikannya sebagai berikut:

> Tetapi kita tidak akan lupa, bahwa kemajuan itu adalah untuk kebahagiaan kita, kebahagiaan manusia dan untuk meninggikan martabat manusia. Dalam mengejar kemajuan, jangan kita terjerumus menjadi "budak" dari kemajuan itu sendiri yang seringkali memerosotkan derajat manusia: menghadapkan manusia satu dengan manusia yang lain, menghadapkan bangsa yang satu dengan bangsa lain, merusak moral dan menurunkan akhlak. Orang dapat menjadi sepi batin dan kosong jiwanya, ditengah-tengah kemajuan dan serba cukupnya kebutuhan lahir. Kemajuan yang demikian bukannya membawa kebahagiaan melainkan mendatangkan malapetaka. Kemajuan yang demikian juga bukan menjadi tujuan pembangunan Bangsa kita. Yang kita tuju adalah kemajuan lahir yang dapat mendatangkan kesejahteraan batin; sehingga kehidupan kita ini benar-benar mempunyai arti yang dalam dan indah.[43]

c. Pidato Presiden Soeharto dalam Peringatan Maulid Nabi Muhammad.

Presiden Soeharto dalam pidatonya yang berjudul "Kekosongan Rohani Tidak Kalah Bahayanya Dibanding Pengotoran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup", Sambutan Presiden pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Tanggal 29

[43] Soeharto, "Agama Mendorong Umatnya untuk Memperbaiki Hidup Melalui Pembangunan, Sambutan Presiden pada Peringatan Nuzulul Qur'an tanggal 6 Nopember 1971 di Istana Negara", dalam *Agama dalam Pembangunan Nasional*, ed. Djohan Efendi dkk. (Jakarta: Pustaka Biru, 1979), 86-87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Januari 1980 di Istana Negara", ia menyakatan tentang pembangunan manusia seutuhnya yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa . Adapun cuplikannya sebagai berikut:

> Dalam pembentukan Negara Republik Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, para pemimpin dan pemuka bangsa kita menetapkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan ideologi nasional bangsa kita pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan menekankan gagasan pada kebutuhan manusia, kita ingin menegaskan bahwa yang kita pentingkan dalam pembangunan Manusia Indonesia bukan hanya kehidupan pisik jasmaniah, melainkan juga kehidupan mental rohaniah. Kita menginginkan lahirnya dan terbinanya manusia-manusia Indonesia yang tidak hanya sehat jasmani melainkan juga sehat rohani, yang tidak hanya cerdas dan berpengetahuan luas, melainkan juga mempunyai watak dan akhlak, yang tidak hanya berpengetahuan tinggi melainkan juga beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. [44]

d. Presiden Soeharto tentang Lagu Arti Kebangsaan Indonesia

Presiden Soeharto yang berjudul "Penghayatan Iman dan Takwa Penting bagi Pembangunan Masyarakat Pancasila" , Sambutan Presiden pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Tanggal 24 Maret1975 di Istana Negara", Ia menyatakan sebagai muslim dengan perkataan " Alhamdulillah" dan menyatakan bahwa pembangunan yang lahiriyah dan batiniyah yang berdasar Pancasila

[44] Presiden Soeharto, " Kekosongan Rohani Tidak Kalah Bahayanya Dibanding Pengotoran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup, Sambutan Presiden pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Tanggal 29 Januari 1980 di Istana Negara", dalam *Agama* .... 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah sejalan dengan keseimbangan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Adapun cuplikannya sebagai berikut:

> Al Hamdulillah, kita harus benar-benar harus bersyukur kepada Tuhan, bahwa sejak semula para pejoang pendahulu kita menyadari hal itu. Lewat lagu Kebangsan kita, terasa oleh kita mereka terus menerus mengingatkan kita: "Bangunlah jiwanya, Bangunlah Badannya, untuk Indonesia Raya". Adalah sejalan dengan itu apabila para pemimpin bangsa kita merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai falsafah Negara kita. Dan dengan demikian, kita mempunyai landasan falsafah dan konstitusi untuk mengembangkan kepribadian kita sebagai bangsa, membangun kehidupan fisik- lahiriyah dan mental-batiniyah. Dan sesungguhnya, apa yang kita lakukan adalah sejalan dengan dasar keseimbangan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW: bekerjalah untuk kepeningan dunia seakan akan kita akan hidup abadi, dan bekerjalah untuk kepentingan akhirat seakan-akan kita akan segera mati esok hari. [45]

e. Pidato Presiden Soeharto tentang Sanksi (hukuman) kepada Kelompok Agama Islam.

Presiden Soeharto dalam pidatonya yang berjudul "P4 Tidak Mengurangi Arti dan Peranan Agama, Sambutan Presiden pada Pembukaan Rapat Kerja Departemen Agama, Tanggal 25 April 1978 di Istana Negara", ia menyatakan bahwa Negara melarang dan member sanksi kepada kelompok agama karena mereka melaksanakan ajaran agama yang salah. Adapun cuplikannya sebagai berikut:

---

[45] Presiden Soeharto, " Penghayatan Iman dan Takwa Penting bagi Pembangunan Masyarakat Pancasila, Sambutan Presiden pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Tanggal 24 Maret1975 di Istana Negara", dalam *Agama…*, 37- 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Apabila dalam keadaan tertentu alat negara terpaksa mengadakan larangan seseorang untuk mengadakan da'wah atau khutbah, misalnya, maka tujuannya bukanlah untuk membatasi melakukan kegiatan agama, melainkan tindakan tersebut terpaksa diambil untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak diinginkan, yang disebabkan oleh penggunaan yang salah dari keleluasaan melaksanakan kegiatan agama itu.[46] Dalam hubungan inilah saya harapkan para petugas dan pejabat Departemen Agama, khususnya yang ada di daerah-daerah dapat memberikan bimbingan dan pembinaan sebaik-baiknya, agar keleluasaan dan kemudahan-kemudahan yang ada untuk melakukan kegiatan agama untuk tidak digunakan secara salah atau sengaja disalahgunakan, sehingga memaksa alat-alat Negara untuk mengambil tindakan yang dirasakan sebagai tindakan pembatasan kegiatan beragama. [47]

Presiden Soeharto berpengetahuan bahwa Pembangunan Nasional Indonesia itu senafas dengan taqwa kepada Allah SWT.

f. Pidato Keagamaan dalam tahun 1975.

Presiden Soeharto juga ikut memberikan sambutan (pidato) dalam sambutan Presiden pada peringatan maulid nabi Muhammad SAW tanggal 24 maret 1975 di Istana Negara ia menyatakan bahwa beriman dan bertaqwa adalah penting dalam Pembangunan Nasional yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Adapun cuplikannya sebagai berikut: :

> Malam ini kembali kita memperingati suatu peristiwa yang amat penting dan bersejarah, ialah kelahiran Nabi Muhammad SAW sekitar empat belas abad yang lampau. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad

---

[46] Presiden Soeharto, " P4 Tidak mengurangi Arti dan Peranan Agama, Sambutan Presiden pada Pembukaan Rapat Kerja Departemen Agama, Tanggal 25 April 1978 di Istana Negara", dalam *Agama ...,* 44

[47] Presiden Soeharto, " P4 Tidak mengurangi Arti dan Peranan Agama, Sambutan Presiden pada Pembukaan Rapat Kerja Departemen Agama, Tanggal 25 April 1978 di Istana Negara", dalam *Agama ...,* 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SAW itu kita peringati setiap tahun pada bulan Rabi'ul awwal, tidaklah semata-mata dengan maksud mengagung-agungkan dan mengkultuskan diri pribadi beliau. Nabi Muhammad SAW sendiri tidak minta dan tidak mau diagung-agungkan dan dikultuskan.[48]

Dalam masyarakat berdasarkan Pancasila yang mengandung sila ketuhanan Yang Maha Esa, maka iman dan taqwa kepada Tuhan menurut agama dan kepercayaan masing-masing adalah mutlak. Dengan keimanan dan ketaqwaan itu, seseorang terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bersifat merusak, fitnah dan membahayakan masyarakat dan bangsa.Untuk itulah, maka dalam usaha pembangunan di bidang keagamaan, masalah pendidikan harus memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh.[49]

… Dan dengan belajar dari sejarah dan kehidupan nabi Muhammad yang kita peringati malam ini, dan dengan terus membangun masyarakat kita yang berdasarkan pancasila ini, maka Insya Allah, kehidupan lahir batin yang kita cita-citakan akan makin kita nikmati. Dan dengan itu kita bukan saja akan berusaha menikmati kehidupan bahagia di dunia yang sekarang, akan tetapi juga berikhtiyar untuk menikmati kehidupan di dunia yang nanti.[50]

i. Pidato Presiden tentang Tujuan Pembangunan

Soeharto sebagai presiden menyatakan bahwa Tujuan Pembangunan Nasional adalah menuju masyarakat adil dan makmur berdasar Asas Tunggal Pancasila dan UUD 1945. Presiden Soeharto berpidato di MPR tahun 1983 dengan cuplikannya sebagai berikut:

[48] Presiden Soeharto, *Agama*, 36.
[49] Presiden Soeharto, *Agama*, 38.
[50] Presiden Soeharto, *Agama*, 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saudara ketua, para wakil ketua dan anggota Majlis Permusyawaratan Rakyat yang saya hormati

Segenap hadirin yang berbahagia.

Marilah kita pertama-tama memanjatkan puji dan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmatNya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat melangsungkan Sidang Umum Majlis Permusyawaratan Rakyat yang insya Allah akan berlangsung sampai tanggal 11Maret 1983 yang akan datang…

Pengalaman kita selama melaksanakan repelita I, Repelita II dan khususnya Repelita III hendaknya dapat benar-benar kita jadikan bahan pelajaran yang berharga dalam menyusun dan melaksanakan Repelita IV nanti benar-benar dapat kita letakkan kerangka landasan, yang akan kita mantapkan lagi dalam Repelita V, sehingga dalam Repelita VI kita dapat tinggal landas dalam pembangunan nasional kita menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur…

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua,

Terima kasih.[51]

g. Pidato Presiden Soeharto

Pidato Presiden Soeharto, tanggal 16 Agustus 1983 di depan Sidang DPR, ia memperingatkan supaya organesasi sosial keagamaan menggunakan satu asas Pancasila. Adapun cuplikannya sebagai berikut:

Karena itu jangan sekali-kali ada yang mempertentangkan agama dan Pancasila, karena kedua keduanya memang tidak bertentangan. Karena itu pula, pelaksanaan GBHN 1983 pasti tidak akan bertentangan dengan

[51] Bustomi Hadjid Ronodihardjo, *Presiden Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Y.D.B.K.M.I, 1983). 35-59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ajaran-ajaran dari agama-agama itu. Dalam Negara Pancasila kebebasan beragama terjamin sepenuhnya. Sifat dan hakikat dari agama agama dihargai setinggi-tingginya dan diakui sepenuh-penuhnya.

Sebaliknya dari organesasi keagamaan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita harapkan jaminan bahwa mereka ikut menjamin kelestarian Pancasila, stabilitas nasional dan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.[52]

Organesasi sosial yang bercorak Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan HMI menerimanya, sedang kelompok Islam Anwar Warsidi dari Lampung Tengah menolaknya.

Nahdlatul Ulama telah menerima Asas Tunggal Pancasila pada tahun 1983. Dalam "Deklarasi Hubungan Pancasila dan Islam" sebagai keputusan Hasil Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 1983 sebagai berikut:

a. Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia adalah prinsip fundamental namun bukan agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
b. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara menurut pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menjiwai sila-sila yang lain mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.
c. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah *aqidah* dan *syariah* meliputi hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.
d. Penerimaan dan Pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan kewajiban agamanya.

[52] Soeharto. "Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat, 16 Agustus 1983, Dalam: Bustami Hadjid Ronodirdjo, *Presiden Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Y.D.B.K.M.I, 1983), 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Sebagai konsekuensi dari sikap tersebut diatas. Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua fihak. [53]

Dalam konggres Muhammadiyah ke-41 di Solo (Surakarta) tahun 1985, Muhammadiyah menerima Asas Tunggal Pancasila setelah mendapat menjelasan dari Presiden Soeharto bahwa agama tidak bisa di-Pancasila-kan dan Pancasila tidak bisa di-agamakan. Selanjutnya Amin Rais menyatakan:

> Dengan pemasyarakatan persepsi persepsi diatas itulah, yang melalui proses yang cukup panjang, akhirnya dalam muktamarnya ke-41 muhammadiyah menerima Asas Tunggal secara proporsional. [54]

HMI juga menerima Asas Tunggal, sebagaimana Nurcholis Madjid menyatakan:

> Namun pada waktu yang sama HMI juga melakukan perjuangan dengan tema *Fight for*, yang proaktif dan positif. Misalnya, kita tidak saja sekedar "melawan" konsep PKI dan para pendukungnya bahwa Pancasila hanyalah alat pemersatu; HMI serentak dengan itu mendukung konsep bahwa Pancasila adalah jiwa bangsa yang berasal dari titik temu berbagai golongan di tanah air. Sebagai alat pemersatu seperti kaum komunis (yang pada dasarnya menolak Pancasila), maka rumusan yang lima itu hanya mempunyai nilai instrumental, dalam pengertian bahwa jika pemersatu yang telah menjadi tujuannya telah terwujud, maka Pancasila itu dapat dibuang. [55]

---

[53] Imam Ghazali Said ( ed), *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999M)*, ( Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN NU) Jawa Timur, 2004), 598.

[54] Amin Rais, "Kata Pengantar", dalam M. Rusli Karim, *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentar*, ( Jakarta: Penerbit Cv. Rajawali, 1986), x-ix

[55] Nurcholis Madjid, "Mempertegas Misi Perjuangan HMI", dalam : *HMI dan KAHMI Menyongsong Perubahan, Menghadapi Pergantian Zaman*, ( Jakarta: Masjis Nasional KAHMI, 1997), 99- 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Reaksi penolakan terhadap Asas Tunggal dilakukan oleh Kelompok Warsidi Lampung Tengah

> Pada Bulan Pebuari 1989, Kelompok Anwar Warsidi melakukan pengajian di Lampung Tengah. Dalam kegiatan pengajiannya, ia menolak Pancasila dan mengkritik pemerintah; Dekadensi moral karena pemerintah tidak menggunakan al-Quran dan Al Hadis. Mereka melakukan aksi militer dan mempersenjai diri dengan anak panah beracun dan bom Molotov. Mereka menamakan diri dengan Mujahidin Fi Sabilillah yang bertujuan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Kelompok ini dapat ditundukkan dengan memakan korban sebanyak 27 orang. Sampai dengan dengan bulan Marat 1989, Pemerintah menahan 227 orang. [56]

Pidato Presiden Soeharto adalah pidato yang serius dalam kehidupan bernegara Indonesia dalam mengatur kehidupan bernegara Indonesia.

4. Pengetahuan Kebudayaan Presiden Soeharto.

Pengetahun Presiden Soeharto sebagai system budaya yang terdiri dari nilai dan norma serta sanksinya.

a. Nilai: 1). Agama Islam, 2). Pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasar pada Pancasila dan UUD 145 yang murni dan konsekwen
b. Norma: Dalam pembangunan, Negara mewajibkan semua organesasi peserta Pemilu dan Organesasi kemasyarakatan harus berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 yang murni dan konsekwen.

---

[56] Marwati Djoened Poesponegoro dkk, *Sejarah Nasional Indonesia VI, Edisi Pemutakhiran*, ( Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 644-648.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sanksi: Negara tetap melarang Partai Komunis Indonesia karena pemberontakan terhadap Negara yang berdasar Pancasila dan UUD 1945; dan penangkapan Kelompok Warsidi Lampung Tengah karena menolak Asas Tunggal Pancasila.

Organesasi sosial keagamaan Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menerimanya; sedang kelompok Islam "Anwar Warsidi" dari Lampung Tengah menolaknya yang selanjutnya organesasi ini dibubarkan oleh Pemerintah Soeharto.

Dalam kerangka analisa semiotika, sejarah Indonesia diperlakukan sebagai unit sejarah yang dijadikan rujukan (reference), sedang pengetahuan kebudayaan Presiden Soekarno dan Soeharto dalam sejarah Indonesia diperlakukan sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui keunikan sebuah pengetahuan kebudayaan.

Dengan ilmu sejarah, arkeologi Islam dapat mengetahui agama Islam dan Pembangunan dalam sejarah Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id